



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LAKIP

TAHUN ANGGARAN 2018



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Tujuan pembangunan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Undang-Undang no. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, Tujuan utama dari pembangunan kabupaten Solok Selatan adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Solok Selatan, tidak hanya masyarakat sejahtera, melainkan juga masyarakat yang religius sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu terwujudnya masyarakat Solok Selatan yang sejahtera dan religius.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri meskipun berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan dari waktu ke waktu, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu tingginya jumlah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja serta belum berkembangnya ekonomi masyarakat transmigrasi.

Dalam rencana pembangunan Kabupaten Solok Selatan, komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan sebagaimana misi ke tiga Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja, Pemerataan persebaran penduduk dan pembangunan kawasan ekonomi baru.

Untuk merealisasikan agenda pembangunan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial tersebut melalui Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Program

peningkatan Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta pengembangan wilayah transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan Pemerintah dan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berikut kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2018.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan LAKIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Dalam Penyusunan LAKIP tahun 2018 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LAKIP ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam

berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021.

### **C. KEDUDUKAN**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Secara keseluruhan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Perbub Nomor 53 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari
  1. Seksi Pelatihan kerja dan produktivitas
  2. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja
  3. Seksi Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

- d. Bidang Transmigrasi
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan
  - 2. Seksi Pengembangan Kawasan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi

## **E. FUNGSI**

- **Kepala**

Kapala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi dilingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan kepala dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- c. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;

- e. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sekretariat terdiri dari ;**

**a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Mempunyai tugas Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, Pengelola Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- d. Pengkooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang.
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas.
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas.
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas.
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas.
- j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban.

- k. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- l. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas.
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler.
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan.
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi.
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas.

- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya.
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja.
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **Kepala Bidang Tenaga Kerja**

Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan dibidang tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas, Hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja, dan penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas, Hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja, dan penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas, Hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja, dan penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan Kerja dan Produktifitas, Hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja, dan penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**

### Fungsi

- a. Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan.
- b. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
- c. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta.
- d. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja.
- e. Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta.
- f. Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
- g. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta.
- h. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta.
- i. Menentukan Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja.
- j. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan.
- k. Menyiapkan program pelatihan.
- l. Menyiapkan sarana dan prasara.
- m. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan.
- n. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja.

- o. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja.

## **2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja.**

### Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mengacu pada rencana kerja Bidang Tenaga Kerja.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **3. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Tenaga Kerja**

### Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengacu pada rencana kerja Bidang Tenaga Kerja.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **4. Kepala UPTD**

##### Fungsi

- a. Perumusan kebijakan Kebijakan teknis operasional UPTD Loka Latihan Kerja;
- b. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi berbasis masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pelatihan kerja dengan camat dan unit- unit kerja terkait;
- d. Pengelolaan Tata Usaha UPTD loka latihan kerja;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing.

##### **• Kepala Bidang Transmigrasi**

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan dibidang transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang permukiman dan penempatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengembangan masyarakat dan kawasan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Informasi dan pembinaan SDM ketransmigrasi
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya ;
- e. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transmigrasi;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Transmigrasi ;
- g. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Transmigrasi ;
- h. Menyelenggarakan fasilitasi Transmigrasi ;
- i. Menyelenggarakan koordinasi transmigrasi ;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Transmigrasi;
- k. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Transmigrasi;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan teknis kerja terkait;
- o. Melaksanakan pembinaan terhadap bawahan;
- p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Transmigrasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

## **1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan.**

### Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan mengacu pada rencana kerja Bidang Transmigrasi.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Kawasan.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Perencanaan dan Pembangunan Kawasan.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2. Seksi pengembangan kawasan**

### Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan mengacu pada rencana kerja bidang Transmigrasi.
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan.
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengembangan Kawasan.
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengembangan Kawasan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **D. ISU ISU STRATEGIS**

Berdasarkan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016, dan Perbub nomor 53 tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan mempunyai peranan yang strategis sebagai sentral perencanaan pembangunan daerah Bidang

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan untuk berbenah diri dan meningkatkan kinerja organisasi.

Beberapa hal yang menjadi isu strategik yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

### **1. BIDANG TENAGA KERJA**

Adapun kondisi dan permasalahan yang cukup potensial di bidang ketenagakerjaan yang perlu dicermati dan ditangani secara seksama adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya jumlah pengangguran terbuka
- b. Terbatasnya kesempatan kerja
- c. Rata-rata pendidikan angkatan kerja masih rendah
- d. Sebagian besar angkatan kerja yang telah ada kurang memiliki keahlian (*skill*)
- e. Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja
- f. Tidak sesuainya lapangan kerja yang ada dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja.
- g. Belum ada wadah penyaluran tenaga kerja baik kedalam maupun luar negeri

### **2. BIDANG TRANSMIGRASI**

Di bidang transmigrasi kondisi lapangan menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Masalah status lahan calon lokasi Transmigrasi belum selesai
- b. Penyelesaian masalah sarana dan prasarana pemukiman dan lingkungan yang belum terfasilitasi dengan maksimal.
- c. Belum adanya dokumen teknis pembangunan kawasan Transmigrasi.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LAKIP-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Selatan Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

### **BAB. I           PENDAHULUAN**

Memuat tentang gambaran umum, maksud dan tujuan, kedudukan, struktur organisasi, isu strategik SKPD dan sistematika penulisan LAKIP OPD Tahun 2018

### **BAB. II           PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Bab ini memuat perencanaan dan penetapan kinerja yang ingin dicapai tahun 2018

### **BAB. III                    AKUNTABILITAS KINERJA 2018**

Bab ini memuat tentang pengukuran kinerja yang dicapai tahun 2018 serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja

### **BAB. IV                    PENUTUP**

Bab ini memuat uraian penutup, permasalahan yang dihadapi serta solusi yang strategis dan rencana kinerja Tahun 2018.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN KINERJA

Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih rinci substansi yang termuat dalam RPJM Daerah. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyusunannya mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 Tahun Kepala Daerah yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang secara keseluruhan mencakup semua bidang pembangunan daerah yang ada di daerah.

##### 1. Visi dan Misi

###### a. Visi

Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah mana yang akan dipilih, untuk mewujudkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Penentuan visi sangat penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi lebih terarah dalam implementasinya.

Adapun visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

**“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Yang Berdaya Saing, Mandiri, Sejahtera dan Religius“.**

## **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, maka disusunlah misi untuk dapat membuat, mengaplikasi dan mengevaluasi strategi. Misi juga haruslah memfokuskan pada kebutuhan pengguna masyarakat (*public needs*) dan kegunaan (*utilities*) dari sebuah perencanaan.

Adapun misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang berkualitas dan berdaya saing .
2. Meningkatkan penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada sektor formal dan informal.
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
4. Membangun Kawasan Transmigrasi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Menciptakan peluang investasi dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat kawasan transmigrasi.
6. Meningkatkan SDM masyarakat kawasan transmigrasi melalui pendidikan formal dan non formal yang mandiri serta religius.

## **2. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Tujuan pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan adalah :

- a. Berkurangnya Pengangguran
- b. Terciptanya Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri

### **3. Sasaran**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan ((2016-2021) dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Sumber daya (SDM, Dana dan Sarana Prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
3. Menciptakan hubungan Industrial yang harmonis.
4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
5. Terbukanya Kesempatan Kerja.
6. Berkembangnya ekonomi masyarakat transmigrasi.
7. Terlaksananya pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu pendek, yaitu tahunan, semesteran atau triwulan. Agar lebih efektif maka sasaran dibuat menjadi lebih spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, adanya skala prioritas dan berlaku pada masa mendatang.

### **4. Kebijakan dan Strategi**

Berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi, maka kebijakan pembangunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

➤ **Mengoptimalkan pengembangan tenaga kerja terlatih entrepreneur melalui pelatihan dan pendidikan**

Pada dasarnya kesempatan dan peluang kerja terbatas disebabkan karena kurangnya keterampilan para pencari kerja. Oleh karena itu strategi ini dirancang dengan harapan mutu dan keterampilan tenaga kerja dapat meningkat dan dapat bersaing dengan yang lainnya dalam era globalisasi ini.

➤ **Meningkatkan perluasan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi**

Diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi pencari kerja melalui perbaikan iklim investasi dan hubungan industrial yang baik

➤ **Pembangunan kawasan pemukiman baru melalui pembangunan kawasan Pemukiman baru dan kawasan perkotaan baru**

Diharapkan dapat menjadi sarana dalam pemerataan pertumbuhan penduduk dan menjadi objek ekonomi baru yang berdampak kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

➤ **Peningkatan pertumbuhan ekonomi warga transmigrasi yang sehingga menjadi transmigran yang berkualitas dan mandiri**

Diharapkan melalui pemberian bantuan untuk eks. Transmigran mampu meningkatkan permodalan usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

## 5. Program dan Kegiatan

Program adalah sekumpulan kegiatan yang sejenis, yang dalam penyusunan renstra disesuaikan dengan nomenklatur fungsi/sub fungsi program/kegiatan pemerintah pusat. Adapun sasaran, kebijakan dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 mencakup :

**Tabel 2**

**Program dan Kegiatan**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	➤ Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
Program peningkatan kesempatan kerja	➤ Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	➤ Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Program pembangunan wilayah transmigrasi	➤ Peningkatan kualitas lembaga ekonomi warga transmigrasi ➤ Penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun yang menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Adapun perencanaan kinerja tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.

Tujuan adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Penyebarluasan informasi bursa kerja

Tujuan adalah untuk menurunkan angka pengangguran melalui penyebar luasan info kerja.

3. Penyelesaian kasus hubungan industrial

Tujuan adalah untuk menciptakan iklim usaha yang harmonis antara pengusaha dan pekerja

4. Pemberian bantuan terhadap warga eks. Transmigrasi

Tujuan adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi warga eks. Transmigrasi

5. Penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi

Tujuan adalah agar tahapan tahapan dari pembangunan PTB dan KPB dapat terlaksana.

## **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan OPD yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah dalam hal ini Bupati Solok Selatan.

Penetapan kinerja tahun 2018 mengacu pada Rencana Startegis 2016-2021, dimana sasaran kinerja disajikan bersama indikator kinerja dan target.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Adapun perjanjian kerja Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Disnakertrans  
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Rata-rata pencari kerja yang dilatih dan bersertifikat	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Orang	196
2	Tingkat Pengangguran	Tersediannya Informasi Bursa Kerja	Bulan	12
3	Parsentase penyelesaian kasus melalui perjanjian bersama	Parsentase jumlah kasus Perselisihan hubungan industrial	%	3
4	Penyelesaian legalitas	Tersedianya dokumen penyelesaian	Dokumen	2

5	lahan transmigrasi	permasalahan lahan transmigrasi		
	Besaran Trasnigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonominya (Kelompok)	Peningkatan ekonomi warga Transmigrasi	Kelompok	7

Penetapan indikator dari masing- masing sasaran dapat dirinci sebagai berikut:

1. Indikator Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dapat di lihat dari :

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Target</b>
➤ Peserta keterampilan menjahit	16
➤ Peserta pendidikan dan keterampilan tataboga	16
➤ Peserta pelatihan calon anggota Polri	50
➤ Peserta Archiment Motivation Training	100
<i>Jumlah</i>	<b>182</b>

2. Indikator Penyebarluasan Informasi bursa kerja dapat di lihat dari :

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Target</b>
➤ Belanja jasa penyebarluasan bursa kerja	1 Paket
<i>Jumlah</i>	<b>1 Paket</b>

3. Indikator Parsentase jumlah kasus hubungan industrial dapat dilihat dari :

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Target</b>
➤ Fasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan industrial	3 kasus
<i>Jumlah</i>	<b>3 Kasus</b>

4. Indikator Tersedianya dokumen penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi dapat di lihat dari :

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Target</b>
➤ Penyusunan dokumen penyerahan tanah untuk transmigrasi	1 Dokumen
➤ Penyusunan dokumen Kelompok Kerja (Pokja) transmigrasi	1 Dokumen
<i>Jumlah</i>	<b>2 Dokumen</b>

5. Indikator Meningkatnya taraf ekonomi warga eks. Transmigrasi dapat dilihat :

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Target</b>
➤ Pemberian bantuan stimulan kepada kelompok sosial ekonomi eks. Transmigrasi	7 Kelompok
<i>Jumlah</i>	<b>7 Kelompok</b>

## F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun penjabaran program dan kegiatan dari kebijakan diatas. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan tetap memperhatikan visi dan misi organisasi, dokumen – dokumen perencanaan daerah.

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Dana (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>POKOK</b>	<b>579.312.764,00</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>500.312.764.00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.999.000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	21.657.000.00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.800.000.00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.500.000.00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.250.000.00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000.00
	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000.00
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12.322.000.00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	5.000.000.00
	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000.00
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	217.784.764.00

	Penyediaan jasa pendukung Administrasi Kantor	102.000.000,00
	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>79.000.000,00</b>
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	79.000.000,00
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYAN DASAR</b>	<b>474.103.000,00</b>
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>409.103.000,00</b>
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	409.103.000,00
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>45.000.000,00</b>
	Penyebarluasan informasi bursa kerja	45.000.000,00
<b>E</b>	<b>PROGRAM PERLINFUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>	<b>20.000.000,00</b>
	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	20.000.000,00
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI</b>	<b>100.000.000,00</b>
	Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	50.000.000,00
	Peningkatan Kualitas Lembaga Ekonomi Warga Transmigrasi	49.750.000,00
	Penyusunan Ranperda Penetapan Peruntukan Lahan Program Transmigrasi Baru (PTB)*)	250.000,00

\*)Kegiatan berubah menjadi penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi,perubahan terjadi pada Perubahan Anggaran.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada penetapan indikator kinerja Disnakertrans tahun 2018 yang telah disepakati. penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengukuran data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja

**Tabel 3.1**

#### **Skala Nilai Peringkat Kerja**

<b>Skor</b>	<b>Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
4	>100%	Sangat Baik
3	75%-100%	Baik
2	55%-74%	Cukup
1	<55%	Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Disnakertrans Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis Disnakertrans Kab. Solok Selatan beserta target dan capaian realisasi dirinci sebagai berikut:

Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	176	176	100	80	80	100	182	182	100
Penyebarluasan Informasi bursa kerja	1	1	100	1	1	100	1	1	100
Parsentase jumlah kasus hubungan industrial				3	3	100	3	2	66,66
Penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi				1	1	100	2	1	50,00
Meningkatnya taraf ekonomi warga eks. Transmigrasi (Kelompok)	0	0	0	3	3	100	7	7	100

## B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIK

Analisis pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3 :**

### **Sasaran dan Indikator Kegiatan Dinsakertrans Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan APBD Perubahan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Meningkatkan Keterampilan tenaga kerja dan sertifikat tenaga kerja	Terciptanya tenaga kerja yang terampil, dan terwujudnya sertifikasi keahlian tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan penyerapan tenaga setengah penganggur	32 orang peserta pelatihan/2 paket	182	100
			100 orang peserta AMT (Achievement Motivation Training)		
			50 orang peserta pelatihan pendidikan Calon Anggota		

			polri Putera Daerah Solok Selatan		
2	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja setengah penganggur	Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja setengah penganggur	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja		
			<b>Informasi penerimaan tenaga kerja 12 bulan</b>		
3	Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan, Penegakan peraturan perundangan sekaligus melindungi tenaga kerja	Terwujudnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan	1 kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan Industrial		
4	Mewujudkan masyarakat transmigrasi yang produktif,berdaya				

	asing, mandiri dan sejahtera	Peningkatan kualitas lembaga ekonomi warga Transmigrasi	1 Kegiatan		
		Penyusunan Ranperda penetapan peruntukan lahan program transmigrasi baru	Penyusunan Ranperda		

## B. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2018 sebesar **Rp. 3.441.142.873,-** capaian indikator kinerja diperoleh dari dana APBDP sebesar **Rp. 3.392.947.322,-** atau 98,59% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai berikut ini :

**Tabel 4**

### **Akuntabilitas Keuangan berdasarkan APBD.P tahun 2018**

No	Program/Kegiatan	Dana (Rp)	Realisasi		Fisik %
			Keuangan (Rp)	%	
<b>1</b>	<b>POKOK</b>	<b>579.312.764.00</b>			
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>500.312.764,00</b>			
	Penyediaan Jasa	3.999.000.00	3.999.000	100	100

	Surat Menyurat				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	21.657.000.00	21.526.234	99.39	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.800.000.00	1.919.350	68.54	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.500.000	62.150.000	99.44	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	28.250.000	24.000.000	84.95	100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	8.551.500	85.51	100
	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000	17.999.850	99.99	100
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12.322.000	12.287.900	99.72	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	5.000.000	5.000.000	100	100
	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000	13.187.000	87.91	100
	Rapat koordinasi dan	217.784.764	216.043.188	99.20	100

	konsultasi ke luar daerah				
	Penyediaan jasa pendukung Administrasi Kantor	102.000.000	93.600.000	91.76	100
	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	100	100
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	79.000.000,00	77.006.500,00	97.47	100
<b>2</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	409.103.000,00	408.808.102,00	99.92	100
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>				
	Penyebarluasan informasi bursa kerja	45.000.000,00	43.214.000,00	96.03	100

<b>E</b>	<b>PROGRAM PERLINFUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>				
	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	20.000.000,00	11.130.000,00	55.65	100
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI</b>				
	Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	50.000.000,00	45.600.747,00	91.20	100
	Peningkatan Kualitas Lembaga Ekonomi Warga Transmigrasi	49.750.000,00	49.750.000,00	100	100
	Penyusunan Ranperda Penetapan Peruntukan Lahan Program Transmigrasi Baru (PTB)	250.000,00	250.000,00	100	100

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten solok Selatan tahun 2018 disusun berdasarkan laporan kinerja yang telah disusun oleh organisasi yang ada di lingkungan Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

Dengan demikian laporan kinerja ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi secara keseluruhan.

Berdasarkan sasaran strategis Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Solok Selatan antara lain adalah:

- a Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
- b Penyebarluasan Informasi bursa kerja
- c Parsentase jumlah kasus hubungan industrial
- d Penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi
- e Meningkatnya taraf ekonomi warga eks. Transmigrasi (Kelompok)

Capaian kinerja unutmk tahun anggaran 2018 adalah:

- a Indikator Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

✚ Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil dengan target indikator kinerja (outcome) yaitu

1.604 orang tenaga kerja terampil pada akhir periode Renstra. untuk mendukung tercapainya program tersebut di lakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang direncanakan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sebanyak 182 orang terdiri dari 16 orang peserta pelatihan menjahit, 16 Orang Peserta Pelatihan tata boga, Pelatihan calon anggota Polri 80 Orang dan pelatihan Archiment Motivation Training sebanyak 100 orang terealisasi 182 orang atau 100%. (**Sangat Baik**).

b. Indikator Penyebarluasan Informasi bursa kerja

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja  
Program yang bertujuan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dengan target indikator kinerja (outcome) yaitu 70.00 Parsen pada akhir periode Renstra. untuk mendukung tercapainya program tersebut di lakukan kegiatan sebagai berikut:
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja yang direncanakan untuk memberikan ketersediaan informasi bursa kerja kepada pencari kerja selama 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%. (**Sangat Baik**)

c. Indikator Parsentase jumlah kasus hubungan industrail

- ✚ Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  
Program yang bertujuan untuk menurunkan Parsentase kasus perselisihan hubungan industrial dengan indikator kinerja (outcome) yaitu 3,75 parsen pada akhir periode Renstra. untuk mendukung tercapainya program tersebut di lakukan kegiatan sebagai berikut:
  - Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang direncanakan untuk menekan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial, pada tahun evaluasi terjadi kasus yaitu 3 kasus dimana 2 kasus dapat

diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) dan 1 kasus berlanjut ke Pengadilan atau 66,67% **(Cukup)**

d. Indikator Tersediannya dokumen penyelesaian permasalahan transmigrasi

✚ Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program yang bertujuan untuk Terbangunya 1 Kawasan PTB dan KPB dengan indikator kinerja (outcome) yaitu 47% parsen pada akhir periode Renstra. untuk mendukung tercapainya program tersebut di lakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penyelesaian permasalahan lahan Transmigrasi yang direncanakan berupa output 2 dokumen (Dokumen penyerahan tanah dan dokumen Pokja) untuk menyelesaikan masalah pertanahan transmigrasi yang diperuntukan bagi perwujudan kawasan Transmigrasi, telah sampai pada pengajuan proposal penyelesaian masalah pertanahan di lokasi calon transmigrasi baru Lubuk Ulang Aling tengah ke Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia serta membentuk kelompok kerja yang melibatkan instansi yang berwenang dalam penyelesaian pertanahan untuk mempermudah koordinasi antar instansi khususnya menyangkut penyelesaian masalah pertanahan. **(Kurang)**

e. Indikator Meningkatnya taraf ekonomi warga Eks. Transmigrasi

✚ Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program yang bertujuan untuk Terbangunya 1 Kawasan PTB dan KPB dengan indikator kinerja (outcome) yaitu 47% parsen pada akhir periode Renstra. untuk mendukung tercapainya program tersebut di lakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Lembaga Ekonomi warga Transmigrasi yang direncanakan untuk memberikan bantuan kepada warga Transmigrasi sebanyak 7 kelompok terealisasi 7 kelompok atau 100%. **(Sangat Baik)**

## 1. Saran

Agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Solok Selatan dalam bentuk:

- a. Perbaiki dokumen perencanaan melalui pengutamakan kegiatan yang mendukung tercapainya target dan sasaran sesuai dengan tupoksi dan visi misi.
- b. Meningkatkan koordinasi teknis dengan instansi terkait, perencanaan, pengendalian, dan pelaporan.

Demikian laporan kinerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Aro, Januari 2019

